

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan entitas penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan desa telah ada sejak sebelum NKRI diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Desa di masa lampau merupakan komunitas sosial dan merupakan pemerintah asli bangsa Indonesia yang keberadaannya jauh sebelum Indonesia berdiri. Bahkan terbentuknya Indonesia dimulai dari pedesaan, fakta menunjukkan bahwa Sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan. Jika dibandingkan jumlah kota dan desa, perbandingannya akan lebih besar jumlah desa dibanding kota.

Salah satu NAWACITA Pemerintahan Jokowi-JK adalah “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat desa dalam kerangka Negara Kesatuan”. Melalui NawaCita ini, pemerintah memposisikan desa sebagai kekuatan besar yang memberikan kontribusi terhadap Indonesia yang bedaulat, Sejahtera dan bermartabat. Desa tidak lagi dijadikan sebagai objek pembangunan Pemerintahan Pusat, tetapi melalui otonomi desa (otonomi asli) desa memiliki wewenang, hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangga desanya sendiri. Kaetini, Katrono (1999: 40-45).

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Replublik Indonesia (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Melalui otonomi desa, menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan desa diperkuat kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain diperkuat kewenangannya, desa juga diberikan sumber-sumber pendapatan sebagai bentuk dukungan pemerintah atas pelaksanaan fungsi serta tugasnya semuanya telah tertuang dalam Undang-Undang Desa.

Desa patut di lindungi dan dijaga keasliannya yang mana adalah bagaia dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana dalam berlangsungnya perkembangan desa tidak terlepas dari peran masyarakat serta Kepemimpinan Kepala Desa dan perangkat desa yang ada pada desa. Yang mana semua peran dan aparat pemerintah desa maupun Masyarakat amat penting dalam proses pembangunan desa.

Dalam melaksanakan pemerintahan desa tentu harus adanya peranan kepala desa. Kepala desa berperan dalam membangun kesadaran Masyarakat untuk berpartisipasi terhadap program-program yang dilakukan oleh pemerintah desa. Karena masyarakat juga mempunyai peranan terhadap tercapainya tujuan dari pembangunan. Perlu adanya suatu koordinasi yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat agar yang menjadi cita-cita bersama dan keadilan social bagi seluruh masyarakat dapat diwujudkan. Koordinasi yang dilakukan oleh seorang pemimpin

dapat mempersatukan usaha dari setiap penanggung jawab pelaksanaan pembangunan atau unit kerja yang ada, guna mempermudah proses pembangunan.

Sebagai kepemimpinan yang baik sangatlah penting. Kepemimpinan yang baik tidak hanya menginspirasi dan memotivasi orang lain, tetapi juga mampu mengarahkan dan memimpin dengan teladan yang baik. Dengan Kepemimpinan yang baik, seseorang dapat menciptakan lingkungan yang positif, produktif, dan harmonis. Oleh karena itu untuk memahami sifat-sifat dan mengaplikasikan prinsip-prinsip kepemimpinan yang baik dalam setiap tindakan dan keputusan seseorang. Dengan begitu, seseorang dapat menjadi pemimpin yang efektif dan dicintai oleh timnya.

Kepemimpinan merupakan sekumpulan dari serangkaian kemampuan dan sifat-sifat dari kepribadian, termasuk di dalamnya kewibawaan, untuk dijadikan sebagai sarana dalam menyakinkan yang dipimpinnya agar mereka mau dan dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan rela, penuh semangat, ada kegembiraan batin, serta merasa tidak terpaksa. Kemampuan seseorang dalam memimpin juga sangat berpengaruh dalam proses pembangunan, yang mana dalam kepemimpinan kepala desa amat sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya proses pembangunan di desa.

Berdasarkan hasil observasi bahwa Kepemimpinan Kepala Desa Loofoun yang saat itu menjabat selama 1 periode kurang membangun suatu hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar. Sehingga dari penilaian inilah masyarakat kurang adanya partisipasi dalam masa kepemimpinannya untuk melaksanakan suatu pembangunan di desa tersebut. Hal ini juga menjadi suatu perbandingan

dengan masa kepemimpinan kepala desa yang sebelumnya, yang dimana kepala desa yang sebelumnya memiliki rasa solidaritas terhadap masyarakat di desa tersebut.

Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ketentuan lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Melaksanakan pembangunan desa bukan hanya tugas dari kepala desa, tetapi merupakan tugas dari seluruh masyarakat desa. Pembangunan desa akan sulit terlaksana apabila tingkat partisipasi masyarakat masih rendah. Karena kunci sukses untuk mensejahterahkan masyarakat dalam pembangunan desa adalah kuatnya sentuhan inovasi, inisiasi, kreasi dan kerjasama antara aparat desa dan masyarakat dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama. Pembangunan desa tidak mungkin dilakukan aparat desa sendiri, tapi butuh dukungan dan peranan aktif dari masyarakat.

Tabel 1.1

Data Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Loofoun
Tahun Anggaran 2017-2020

| NO | TA | NAMA KEGIATAN | BENTUK PARTISIPASI | TARGET | JUMLAH PARTISIPAN |
|----|------|------------------------------|---|----------|-------------------|
| 1 | 2017 | Pembangunan Gedung posyandu | Masyarakat secara suka rela turut membantu dalam proses pembangunan dan pengerjaan posyandu | 20 Orang | 10 Orang |
| | | Pembangunan drainase | Masyarakat berpartisipasi aktif dan turut serta mengambil bagian sebagai pekerja dalam proyek pembangunan drainase desa. | 25 Orang | 5 Orang |
| | | Pembangunan jalan usaha tani | Secara suka rela masyarakat memberikan hak pelepasan tanah kepada pemerintah daerah terkhusus pemerintah desa untuk membangun jalan guna memperlancar mobilisasi dan akses desa | 25 Orang | 10 Orang |
| | | Perkerasaan Jalan Dusun | Masyarakat berpartisipasi aktif dan turut serta mengambil bagian sebagai pekerja dalam proyek | 25 Orang | 10 Orang |

| | | | | | |
|---|------|-----------------------------|--|----------|----------|
| | | | pembangunan jalan dusun. | | |
| 2 | 2018 | Pembangunan Rabat Jalan | Masyarakat berpartisipasi aktif dan turut serta mengambil bagian sebagai pekerja dalam proyek pembangunan rabat jalan. | 20 Orang | 7 Orang |
| | | Pembangunan Balai Dusun | Setiap warga dusun turut serta dalam pembangunan balai dusun dan juga beberapa warga ikut menyumbangkan beberapa jenis material. | 15 Orang | 5 Orang |
| | | Pembangunan Embun 2 Unit | Pelepasan tanah oleh warga desa dan juga banyak masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan sebagai pekerja. | 25 Orang | 10 Orang |
| | | Pembangunan Gedung Posyando | Masyarakat secara sukarela turut membantu dalam proses pembangunan dan pekerjaan posyando. | 15 Orang | 5 Orang |
| | | Pembangunan Bak PAH 3 Unit | Sadar akan pentingnya keberadaan air bersih, para warga bergotong royong dalam mengerjakan bak penampung air guna memenuhi kebutuhan air bersih. | 10 Orang | 7 Orang |
| | | Pekerjaan Jalan Dusun | Masyarakat berpartisipasi aktif dan turut serta mengambil bagian | 15 Orang | 8 Orang |

| | | | | | |
|---|------|-------------------------------------|--|----------|----------|
| | | | sebagai pekerja dalam proyek pembangunan jalan. | | |
| 3 | 2019 | Pemabangunan Gedung Paud | Masyarakat desa mengambil bagian sebagai pekerja dalam pembangunan ini. | 12 Orang | 10 Orang |
| | | Pembangunan Rabat Jalan | Masyarakat berpartisipasi aktif dan turut serta mengambil bagian sebagai pekerja dalam proyek pembangunan rabat jalan. | 20 Orang | 18 Orang |
| | | Rehap Gedung Pos Kesdes Borok Tetuk | Masyarakat desa mengambil bagian sebagai pekerja dalam pembangunan ini. | 15 Orang | 10 Orang |
| | | Perkerasaan Jalan Lingkungan | Masyarakat berpartisipasi aktif dan turut serta mengambil bagian sebagai pekerja dalam proyek pembangunan jalan. | 25 Orang | 20 Orang |
| | | Pembangunan Jembatan Mini | Pentingnya penghubung antar kampung, warga desa sangat berperan aktif dalam menyelesaikan pekerjaan ini. | 20 Orang | 10 Orang |
| | | Rehap Sumur Gali | Sadar akan pentingnya | 8 Orang | 5 Orang |
| | | Pembangunan Sumur Gali 3 Unit | keberadaan air bersih, para warga bergotong royong dalam mengerjakan | 10 Orang | 8 Orang |
| | | Pembangunan Bak PAH 3 Unit | bak penampung air guna memenuhi kebutuhan air | 15 Orang | 12 Orang |
| | | Pengadaan Viber Air | bersih. | 20 Orang | 15 Orang |

| | | | | | |
|---|------|--|--|----------|----------|
| 4 | 2020 | Bersih 2.200 Ltr (40 Unit) | | | |
| | | Pengadaan Handtraktor 2 Unit | Masyarakat membentuk kelompok tani terpadu dalam bentuk dukungan terhadap pemerintah desa. | 10 Orang | 6 Orang |
| | | Pembangunan Jalan Usaha | Masyarakat berpartisipasi aktif dan turut serta mengambil bagian dalam proyek pembangunan jalan demi memperlancar mobolitas desa. | 20 Orang | 15 Orang |
| | | Pengadaan Viber Air Bersih Ltr (50 Unit) | Sadar akan pentingnya keberadaan air bersih, para warga bergotong royong dalam mengerjakan bak penampung air guna memenuhi kebutuhan air bersih. | 25 Orang | 20 Orang |
| | | Pembangunan Embung | Pelepasan tanah oleh warga desadan juga banyak masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan sebagai pekerja. | 15 Orang | 10 Orang |

Sumber: Kantor Desa Loofoun

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan ini juga melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat, proyek pembangunan dapat menjadi lebih tepat sasaran dan relevan dengan kondisi serta kebutuhan desa loofoun. Namun data yang di atas terlihat bahwa masyarakat kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan desa tersebut. Dalam konteks ini pembangunan

telah berjalan sejak lama, namun masih ada pembangunan yang belum terselesaikan. Peneliti akan mengungkapkan apakah yang sebenarnya membuat masyarakat kurang berpartisipasi dalam program-program Pembangunan serta faktor-faktor yang menghambat sehingga beberapa pembangunan di desa tersebut belum terselesaikan hingga saat ini, apakah kurangnya gaya kepemimpinan kepala desa yang masih kurang optimal atau karena kurangnya partisipasi masyarakat di desa tersebut.

Dalam proses pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 mengacu pada dua pola pendekatan yaitu “Desa Membangun” dan “Membangun Desa” yang mana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan Desa merupakan suatu proses yang berlangsung di desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang mencakup segala aspek kehidupan dan kehidupan masyarakat. Dalam konteks pembangunan, dalam pemerintahan Indonesia di canangkan berbagai program di antaranya seperti program Impres Desa tertinggal, program pembangunan infrastruktur Pedesaan, program alokasi dana Desa, program PNPM dan sebagainya. Semua program khusus ini bertujuan untuk mempercepat upaya pembangunan di daerah pedesaan.

Pembangunan di desa Loofoun Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, adalah sebuah desa yang jauh dari keramaian kota, yang mana penulis masih melihat adanya pembangunan yang masih belum terselesaikan, padahal pembangunan yang telah berjalan itu telah dimulai dari sejak lama, dan dalam konteks ini penulis akan mengungkapkan apakah yang sebenarnya membuat beberapa pembangunan di desa tersebut belum terselesaikan hingga saat ini, apakah karena kurangnya partisipasi masyarakat di desa tersebut atau kah gaya kepemimpinan kepala desa yang masih kurang optimqal. Dalam meningkatkan pembangunan di desa Loofoun demi tercapainya keadilan sosial dibutuhkan partisipasi dari masyarakat Desa Loofoun untuk ikut terlibat aktif dalam setiap program pemerintah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang **“KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAPA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA LOOFOUN KECAMATAN MALAKA BARAT KABUPATEN MALAKA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, masalah penelitian dirumuskan: bagaimanakah kepemimpinan kepala desa dalam meninkatkan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembagunan desa?

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

1. Secara praktis:

- a. Sebagai informasi tentang kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa.
- b. Sebagai rekomendasi bagi pemerintah desa tentang kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

2. Secara Teoriti

Sebagai informasi tentang kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa.